

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan pengangkatan anak berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk, serta mengidentifikasi kekosongan normatif dalam hukum positif Indonesia terkait prosedur pembatalan pengangkatan anak. Isu yang dikaji adalah ketidakharmonisan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, serta ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara eksplisit mekanisme pembatalan pengangkatan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiadaan pengaturan hukum yang spesifik, hakim menggunakan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan utama. Putusan menyatakan batal demi hukum penetapan pengangkatan anak yang sebelumnya ditetapkan oleh pengadilan, dengan mengembalikan status hukum anak kepada orang tua kandung. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi agar terdapat kepastian hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, analisis juga memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara pendekatan yuridis dan pertimbangan sosial-emosional dalam perkara keluarga. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi dinamika sosial dan perlindungan anak. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga dan memberikan dasar normatif bagi perumusan kebijakan pengangkatan dan pembatalan anak ke depan.

Kata Kunci: Anak, Pengangkatan anak, Hukum Keluarga.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal considerations of judges in the annulment of child adoption based on Decision Number 31/Pdt.G/2022/PN Njk, and to identify the normative gap within Indonesian positive law regarding the procedure for annulling adoption. The issue examined involves the breakdown of the relationship between the adoptive child and adoptive parents, as well as the absence of explicit legal provisions regulating the annulment process. This study adopts a normative legal research method with a juridical-normative approach and a descriptive-analytical nature. Data were collected through document studies of court decisions, statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature. The research employs both statutory and conceptual approaches. The findings reveal that in the absence of specific legal regulations, the judge relied on the principle of the best interest of the child as the main basis for consideration. The court ruled the previous adoption decree null and void by law and restored the legal status of the child to her biological parents. These findings highlight the urgent need for regulatory reform to provide legal certainty in cases of adoption annulment. Furthermore, the analysis underscores the importance of balancing legal reasoning with socio-emotional considerations in family law cases. The implications of this study suggest that policy reform is essential to accommodate social dynamics and enhance child protection. The research contributes to the development of family law theory and provides a normative foundation for the formulation of future adoption and annulment policies.

Keywords: Children, Adoption, Family Law.